

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara, demokrasi sebagai institusi telah digunakan sebagai alternatif dari berbagai pengaturan aktivitas negara dan sosial. Dalam pandangan Moh. Mahfud MD, demokrasi adalah sistem sosial dan negara sebab dua argumen. Pertama, mendekati setiap negara di dunia menganggap demokrasi menjadi prinsip fundamental. Kedua, demokrasi menjadin arah negara pada dasarnya berorientasi pada peran masyarakat sebagai organisasi tertinggi dalam mengelola negara. Oleh sebab itu, warga negara yang demokratis wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang demokrasi. Demokrasi yang sedang berkembang seperti itu seringkali bersifat politis dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan individu, kesetaraan dan hak untuk memilih seluruh masyarakat. Sarana yang fundamental untuk menentukan kekuasaan suatu negara adalah undang-undang, baik tercantum meskipun bukan. Konstitusi harus menjalankan kewenangan warga negara di bidang politik dan menjadi dasar pemisahan kekuasaan pemerintahan..<sup>1</sup>

Politik demokrasi di Indonesia mempunyai corak, watak, dan ciri-ciri demokrasi selalu bergantung pada kekuasaan rezim pemerintahan tertentu. Demokrasi adalah pembenaran legitimasi oligarki. Paket luarnya ialah kaidah demokrasi melalui alat kalangan politik serta pemilu untuk memproses kembali kekuasaan yang mengarah buruk..<sup>2</sup>

Salah satu indikator demokrasi adalah terbukanya ruang partisipasi politik oleh rakyat. Bagaimana orang berpikir dan merasakan dalam kondisi kelompok membawa untuk menumbuhkan potensi mereka akan menggapai tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab untuk kelompok. Dalam jurnal berjudul Pemilihan Umum Papua Nugini oleh David Hangerti, dapat disimpulkan tiga komponen penting yang wajib dipegang masyarakat agar berkenan turut bersungguh-sungguh dalam keterlibatan politik, yaitu ideologi

---

<sup>1</sup> Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: UNY Press), hlm. 22-23

<sup>2</sup> Aji Deni, *Konsolidasi Demokrasi: Perbaikan Kualitas Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2016), hlm. 2-3

serta pernyataan pendapat dukungan untuk berpartisipasi dan kewajiban Bersama-sama.<sup>3</sup>

Keterlibatan dalam politik pada hakekatnya merupakan tindakan sukarela dan sadar, bebas dari desakan atau Tindakan dari siapa saja. Oleh sebab itu, keterlibatan politik terikat dengan interpretasi warga negara atau pemilih tentang pendidikan politik. Partisipasi politik mewujudkan syarat sepenuhnya dari bentuk politik yang demokratis. Bentuk politik yang sempurna membutuhkan keterbukaan organisasi politik menjadi wujud keterlibatan warga negara. Pembukaan media kontak politik sebagai perhimpunan bergabung dengan politik hendak disiarkan amanat politik berbentuk ketentuan, penentananagan, dorongan (pandangan dan keinginan) dipusat pemrosesan sistem politik, dan hasil perbuatan ini merupakan bentuk pengembalian politik.<sup>4</sup>

Sosialisasi berskala besar dan proses pendidikan politik mendukung tingkat partisipasi politik yang tinggi. Sosialisasi politik ialah metode peciptaan perbuatan dan perilaku politik, cara untuk satu keturunan untuk meneruskan norma serta kepercayaan politik ke keturunan berikutnya. Dalam pandangan ini, menurut Alfian, melewati metode sosialisasi politik bagian warga negara mampu mengetahui, mempelajari, dan mengamalkan nilai-nilai politik yang spesifik yang memengaruhi perbuatan serta perilaku politik sehari-hari.

Faktor penting dalam sosialisasi politik ialah adanya agen atau aktor yang melaksanakan prosedur sosialisasi politik. Tanpa adanya agen atau pelaku sosialisasi politik, proses sosialisasi politik tidak dapat berjalan. Karena kunci sosialisasi politik adalah perlunya interaksi antara aktor dan individu. Namun, pengertian agen atau agen yang disosialisasikan tidak terbatas pada individu, bahkan di mana sosialisasi politik dipertahankan, sering merujuk pada beberapa subjek. Melihat berdasarkan hasil penelitian para cendekiawan, agen atau aktor sosialisasi politik dalam bentuk keluarga, organisasi pendidikan baik rendah, menengah, dan tinggi, golongan sosial, lingkungan kerja, sarana komunikasi, dan kontak politik secara langsung.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> David Hagerti, Pemilihan Umum di Papua New Guinea, *Jurnal Ilmu Politik*, (Jakarta: UI, 13, 1998), hlm. 76.

<sup>4</sup> Miaz Yalvema, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Padang: UNP Press, 2012), hlm. 23

<sup>5</sup> Haryanto, *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*, (Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2018), hlm. 32.

Lembaga serta prosedur pendidikan bertindak fundamental saat membangun karakter politik warga negara pada suatu negara. Sebagaimana juga sebaliknya, forum-forum serta prosedur politik mengusung imbas dalam ciri pengetahuan pada suatu negara. Ikatan pendidikan politik mempunyai sifat yang mempunyai pengalaman, berperan sejak lama semenjak awal bertumbuhnya kebudayaan manusia. Dalam prosedur implementasi sosialisasi politik, dibutuhkan fasilitator yang merupakan komunikator politik menjadi subjek yang cakap menumbuhkan komunikasi kritis dalam proses sosialisasi.<sup>6</sup>

Sosialisasi politik bisa diibaratkan menjadi penghubung nilai-nilai kepercayaan politik serta kultur politik kegenerasi berikutnya. Sosialisasi politik sebagai sarana guna mewujudkan masyarakat mempelajari dan mengetahui posisi politiknya dalam aktivitas komunitas.<sup>7</sup> Sosialisasi politik mengandung isu-isu fundamental yang berkaitan atas prosedur dan maksud yang diperlukan dalam perjalanan politik suatu negara. Jadi, sosialisasi politik diasosiasikan dengan transmisi memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai politik, perilaku, keyakinan politik dan ekspektasi politik.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, ada organisasi Islam di Indonesia yang mempunyai keterikatan terhadap Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan mempunyai organisasi kepemudaan, Gerakan Pemuda Ansor. Komitmen GP Ansor menjadikannya sebagai OKP (Organisasi Pemuda) yang pokok untuk mewujudkan generasi muda sebagai politisi yang berpandangan Islami dan nilai-nilai budaya bangsa. Peran politik kader/alumni GP Ansor dapat dilihat dalam politik Indonesia. Meninjau keterlibatan Nahdlatul Ulama mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor menjadi objek kajian pendidikan politik yang berorientasi Islam dan mengangkat tinggi nilai-nilai kultur bangsa bisa memajukan kesadaran patriotism pemuda Indonesia.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam tertinggi di Indonesia menjadi penegasan formal para ulama yang menganut siasat dari

---

<sup>6</sup> John Balla dan Ramadhan, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Fasilitator*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 6.

<sup>7</sup> Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa*, (Jakarta: Geupedia Publisher, 2008), hlm. 7.

<sup>8</sup> Haryanto, *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*, (Yogyakarta: Research Center for Politic and Government, 2018).

empat madzhab besar, antara lain Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, di kampung Surabaya di tanggal 31 Januari 1926.<sup>9</sup>

Salah satu BANOM (badan otonom) Nahdlatul Ulama adalah GP Ansor. Kelahiran GP Ansor menandakan antusiasme pergaulatan, nasionalisme, emansipasi dan kepahlawanan. GP Ansor lahir dalam kondisi asimilasi di sela para pelopor muda sesudah para pemuda disumpah, semangat patriotism, demokrasi, dan sekaligus antusiasme agama. Maka, sejarah organisasi pemuda Tentara Hizbullah GP Ansor dan Banser (Barisan Serbaguna) menjadi wujud pertempuran Ansor hampir melegenda. Dalam pertempuran antikolonial, Ansor memainkan peran yang sangat penting.<sup>10</sup>

Peranan Gerakan Pemuda Ansor dalam aktivitas berbangsa dan bernegara tidak bisa dipungkiri. Semoga Gerakan Pemuda Ansor menjadi wadah aksi dan pengabdian praktis Agama, Negara, Ulama, Pesantren melalui mentaati nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Itulah yang dimaksud dengan Gerakan Pemuda Ansor dan organisasi pemuda yang lain. Gerakan Pemuda Ansor berlandaskan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Manusia yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta seluruh rakyat Indonesia.

Nilah peran pemuda sebagai pelopor pembangunan negara yang diabadikan dalam UU RI No.1. Pasal 16 No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur bahwa “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Demikian pula UU RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 6 mendefinisikan ciri pemuda sebagai “memiliki semangat juang, semangat kerelawanan, rasa tanggung jawab dan kesatriaan, kritis, idealis, inovatif, giat, dinamis, reformis, ideologi dan futurisme”, menjadi pendukung asumsi mendasar bahwa pemuda berperan penting dalam roda kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, perlu diwariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi millennial dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai yang tercantum. Sosialisasi bukan tentang menyesuaikan diri dengan institusi, norma, dan nilai, tetapi tentang membuat generasi muda menjadi agen kreatif dalam kehidupan politik.

Untuk memperjelas batas penelitian, maka peneliti membatasi objek penelitian pada GP Ansor Kabupaten Pati dengan

---

<sup>9</sup> Cairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu Satu Surabaya, 1999), hlm. 3.

<sup>10</sup> <https://ansor.id/profil/diakses> pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.31 WIB.

pertimbangan jumlah penduduk yang banyak dan cabang yang rimbun. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pati merupakan salah satu organisasi swadaya Nahdlatul Ulama (NU) yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. GP Ansor Kabupaten Pati telah banyak berperan, salah satunya dalam bidang politik. Menurut GP Ansor Pati, pelaksanaan pendidikan politik menciptakan karakter kepemimpinan yang religius, tanggung jawab, percaya diri, disiplin, jujur, mandiri, peduli sesama, kreatif, pantang menyerah, toleransi dan nasionalisme.

### **B. Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian pada apa yang menggambarkan pengamatan utama dalam penelitian, yaitu objek kajian khusus dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana Pendidikan dan Sosialisasi Politik GP Ansor Kecamatan Kayen Dalam Rangka Implementasi Nilai-nilai Demokrasi terhadap kader-kadernya. Dalam kajian ini, penulis fokus terhadap kepemimpinan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pati terhadap Pendidikan dan Sosialisasi Politik untuk mendorong kadernya dalam rangka implementasi nilai-nilai demokrasi.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian berisi meliputi pertanyaan masalah dijawab dengan proses penelitian. Pertanyaan rumusan masalah harus didasarkan pada latar belakang munculnya masalah, hasil studi pendahuluan, serta kajian literatur yang mendukung. Peneliti mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemuda Ansor Kabupaten Pati dalam melaksanakan pendidikan dan sosialisasi politik bagi kadernya ?
2. Apa saja program GP Ansor Kecamatan Kayen dalam rangka Implementasi Nilai-nilai Demokrasi ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran Pemuda Ansor Kabupaten Pati dalam melaksanakan pendidikan dan sosialisasi politik bagi kadernya
2. Untuk menganalisis apa saja program GP Ansor Kecamatan Kayen dalam rangka implementasi nilai-nilai Demokrasi



### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Akademik, manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menyumbangkan ide untuk perdebatan ilmiah, khususnya tentang ilmu politik dalam rangka implementasi nilai-nilai demokrasi.
  - b. Penelitian secara sosial diharapkan menjadi salah satu bahan dan perhatian semua pihak yang membutuhkannya referensi untuk memperluas wacana keilmuan khususnya mengenai ilmu politik dalam rangka implementasi nilai-nilai demokrasi.
2. Secara praktis
  - a. Untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus dan mengetahui lebih jelas bagaimana pendidikan dan sosialisasi politik Gerakan Pemuda Anshor Kecamatan Kayen dalam rangka implementasi nilai-nilai demokrasi generasi muda NU.
  - b. Semoga dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh mahasiswa, menambah wawasan dan referensi penelitian baru untuk penelitian ini.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi atau penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran umum dan garis-garis dari setiap bagian atau isi yang saling berhubungan, sehingga akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah system penelitian skripsi yang akan disusun oleh penulis.

1. Bagian awal
 

Pada bagian ini terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan (formular pengesahan dan persetujuan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing), daftar isi, daftar gambar dan tabel.
2. Bagian isi
 

Pada bagian utama dalam penulisan ini terdiri dari

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian tentang hal-hal yang melatarbelakangi munculnya masalah penelitian. Yang diantaranya adalah latar belakang masalah, fokus

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Kerangka teori dan landasan teori**

Bab ini berisi deskripsi teori-teori yang relevan terkait dengan masalah penelitian yang berkaitan dengan nilai-nilai Demokrasi dan kepemimpinan seorang pemimpin. Selain itu, juga memuat penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait atau studi-studi sebelumnya seperti studi-studi dari beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis, yang membantu peneliti dalam pengumpulan dan interpretasi data.

**BAB III : Metode penelitian**

Pada Bab Metode Penelitian memuat uraian tentang teknis dan metode yang dapat diterapkan atau metode operasional untuk melakukan penelusuran. Demikian penjelasan peneliti prosedur dalam melaksanakan penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, *setting* penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, dan dokumentasi), sumber data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil dan Analisis Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan Pendidikan dan Sosialisasi Politik Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kayen dalam rangka implementasi nilai-nilai demokrasi.

**BAB V : Penutup**

Bab ini terdiri dari simpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir dalam penulisan skripsi ini terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran yang berisi dokumen terkait masalah penelitian .